

Menyingkap Arena Kuasa Simbolik Islam Ideologis (Studi Lapangan di Yogyakarta)

Iskandar Zulkarnain*

Abstract

The researcher discusses the symbolical power field of Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) and Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) which fight the strategic arena as the political tools to achieve the substantive power after the order regime. HTI and MMI as ideological Islam organizations which struggle Islamic Syariah formalization in state and nation order can be analyzed using Pierre Bordieu conceptual framework. It consists of three key concepts as follow: habitus, champ and symbolic power. Those key concepts are formulated in political dakwah and jihad which invite personnel's or among members to change an old paradigm to a new paradigm (fully syariah) to create a uniformity and habitus reproductions.

Field of struggles are directed to dominate political fields which institutional based, community based, and governmental institutions through an economic capital hegemony, a culture, a social and symbolic powers. The economic capital can be means of production possession, materials, and money changes as inherited investment in a long period. Culture capitals are accumulated into intellectual hegemony, discourses, and argumentations to get social positions. The culture capitals are directed to social networks (cooperation's) ownership and authorities in relation to an other stakeholder or power holders. Symbolic capitals is the accumulation of economic, culture and social capitals which deal with a prestige, status, authority and legitimacy from other stakeholders. A symbolic capital hegemony is the centre of field of struggles domination and requirements to get symbolic powers.

Keywords: *Islam Syariah, fields, power, domination.*

A. Pendahuluan

Dinamika perjuangan kekuasaan organisasi Islam ideologis di Indonesia sangat menarik untuk dikaji. Menarik lantaran organisasi Islam ideologis menjadikan Islam sebagai ideologi tunggal, yakni sebagai suatu sistem keyakinan berdasarkan pada wahyu yang diwujudkan dalam praksisme untuk mencapai kekuasaan: menegakkan syariat Islam. Dinamika kekuasaan itu diawali sejak pra-kemerdekaan dengan terbentuknya organisasi Sarekat Islam (SI) yang melahirkan peristiwa Piagam Jakarta. Perjuangan kekuasaan berlanjut ke rezim Orde Lama di mana terjadi manipulasi politik pencoretan Piagam Jakarta, peristiwa Sidang Konstituante 1959, dan pemberontakan DI/TII (Nashir, 2007) dengan umat Islam sebagai pihak terpinggirkan. Tak jauh berbeda dengan Orde Baru, Islam politik

*□ Staf Pengajar pada Jurusan Sosiologi Universitas Bangka Belitung

dibuat tak berdaya oleh penguasa Orde Baru yang melakukan politik represif dan otoriter dengan pemberlakuan Pancasila sebagai asas tunggal (Panggabean dan Amal, 2004). Kebijakan ini sekali lagi mengkebiri hak-hak politik parpol dan organisasi Islam ideologis yang membuat gerak perjuangannya kian terpasung.

Ketika struktur represif Orde Baru mulai berubah pada akhir tahun 1990-an, organisasi Islam ideologis menemukan peluang politik untuk merapatkan kembali barisannya. Keberadaan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang terbentuk pasca Orde Baru (Ahnaf, 2004) turut menghiasi perjuangan kekuasaan di Indonesia termasuk Yogyakarta. Kedua organisasi ini berkompetisi mengajukan sistem Islam sebagai alternatif atas sistem sekuler menjadikan perjuangan kekuasaan atas arena-arena di Yogyakarta semakin dinamis.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini fokus pada dua pertanyaan kunci. Pertama, apa yang menjadi arena kuasa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) di Yogyakarta?. Kedua, kemana perjuangan arena kuasa oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) di ranah praksis itu bermuara?

C. Tinjauan Pustaka

Dalam menganalisa organisasi Islam ideologis penulis menggunakan perspektif Pierre Bourdieu sebagai *tool of analysis*. Perspektif Bourdieu yang terelaborasi dalam beberapa konsep utama yakni *habitus*, arena perjuangan (*champ*), dan kekuasaan simbolik menjadi relevan dalam mengkaji individu atau kelompok masyarakat sosial. Deskripsi konsep utama Bourdieu di atas adalah sebagai berikut:

Pertama, habitus merupakan konsep khas Bourdieu yang berasal dari tradisi pemikiran filsafat adalah satu kata bahasa Latin yang mengacu pada kondisi, penampakan, atau situasi tipikal (*habitual*) khususnya pada tubuh (Jenkins, 2004). Dalam hal ini *habitus* bisa berarti kebiasaan seseorang, sesuatu yang terkait erat dengan penampilan diri, atau menunjuk pada tata pembawaan yang terkait dengan kondisi tipikal tubuh. Secara epistemologis, istilah *habitus* digunakan untuk menunjukkan aspek perlengkapan bagi substansi tertentu seperti keinginan, bertindak, dan berpikir (Fashri, 2007).

Menurut pandangan Bourdieu seperti dikutip Richard Jenkins (2004) *habitus* memiliki tiga makna. Pertama, bermakna nalar. *Habitus* hanya ada selama ia ada di kepala aktor. Kedua, *habitus* hanya ada di dalam tubuh aktor yang disebabkan oleh tindakan dan interaksi antara aktor dengan lingkungannya. Makna ini meliputi cara berbicara, bergerak, membuat sesuatu, atau apa pun. Ketiga, taksonomi praksis, *habitus* yang berakar di dalam tubuh yang dapat diakses panca indra yang memunculkan interpretasi atas simbol *habitus*. Konsep *habitus* Bourdieu ini sebenarnya ingin menciptakan koherensi hubungan konsepsi masyarakat dan pelaku dalam suatu tindakan sosial sehingga dalam praksisnya membutuhkan adanya disposisi yang berfungsi menentukan arah orientasi sosial, cita-cita, selera, cara berpikir, etos, dan sebagainya. Dalam praksisnya, disposisi

menciptakan keseragaman *habitus* yang pada akhirnya menjadi basis bagi penstrukturan (strukturisasi) terus-menerus, ditandai oleh munculnya para agen interaksi sosial sebagai pelaku strategi (Beilharz, 2002). Agen-agen pelaku strategi yang didisposisikan oleh *habitus* inilah yang bertarung dalam memperebutkan kekuasaan, kehormatan, modal simbolik dalam ragam bidang pemikiran dan tindakan.

Kedua, konsep arena perjuangan (*champ*). Konsep "arena" dalam pandangan Bourdieu menempati fungsi dalam sistem penjelasan teori sosial. Istilah "arena" ini menghubungkan konsep *habitus* dan modal (*capital*). *Habitus* terkait erat dengan posisi sosial tertentu dalam sebuah arena perjuangan, sedangkan *champ* merupakan tempat pertarungan kekuatan-kekuatan yang di dalamnya terdapat perjuangan untuk memperebutkan sumber daya (*capital*) dan juga kesempatan untuk mengakses sesuatu yang dekat dengan hirarki kekuasaan.

Berbicara mengenai *champ* tak dapat terlepas dari modal. Merujuk pada Bourdieu seperti yang dikutip Fauzi Fashri (2007), ada empat jenis modal yang jika dikuasai oleh individu maupun kelompok akan menempatkan mereka sebagai pemenang kompetisi. Keempat modal tersebut adalah: pertama, modal ekonomi yang meliputi alat-alat produksi, materi, dan uang yang dapat diwariskan antar generasi. Kedua, modal budaya yang mencakup ijazah, pengetahuan yang telah diperoleh, kode-kode budaya, cara berbicara, kemampuan menulis, sopan santun, cara bergaul, dan sebagainya yang semua itu berperan dalam penentuan dan reproduksi kedudukan-kedudukan sosial. Ketiga, modal sosial yang menunjukkan kepemilikan jaringan sosial pelaku (individu atau kelompok) dalam hubungannya dengan pihak lain yang memiliki kuasa. Keempat, modal simbolik yakni modal yang tidak terlepas dari kekuasaan simbolik yang berupa prestise, status, otoritas, dan legitimasi yang terakumulasi dan membentuk modal simbolik. Kepemilikan atas modal simbolik inilah yang menjadi sentral utama karena dengannya kekuasaan simbolik akan tercapai. Namun, efektivitas kerja modal simbolik sangat tergantung pada penguasaan strategi-strategi seperti strategi investasi biologis, ekonomi, dan simbolik (Haryatmoko, 2003). Tujuan strategi-strategi tersebut adalah untuk mempertahankan modal di satu sisi dan ada pula yang ingin mengubah distribusi modal-modal dalam kaitannya dengan hirarki kekuasaan di sisi lainnya.

Ketiga, konsep kekuasaan simbolik. Kekuasaan simbolik dalam pandangan Bourdieu adalah kekuasaan yang diperoleh melalui hasil mobilisasi ekonomi dan fisik (Haryatmoko, 2003). Sebaliknya kekuasaan simbolik menurut Suma Riella Rusdiarti dengan mengutip Bourdieu mengatakan bahwa kekuasaan simbolik merupakan kekuasaan yang diperoleh dari upaya "memaksakan" pihak lain untuk memberi pengakuan atas suatu tindakan praksis lewat pertarungan simbolik (Rusdiarti, 2003). Berdasarkan pandangan tersebut, dapat dikatakan kekuasaan simbolik mempunyai relasi erat dengan modal simbolik yang berupa prestise, status, otoritas, dan legitimasi.

Kekuasaan simbolik semakin menemukan ranah perjuangannya jika terdapat mobilisasi sumber-sumber modal dalam pengorganisasian sosial. Pengorganisasian sosial yang kemudian menghasilkan suatu dominasi kekuasaan simbolik sangat tergantung pada situasi, sumber daya, dan strategi individu atau

kelompok (Haryatmoko, 2003). Penggunaan strategi individu atau kelompok harus memenuhi dua syarat utama, yakni penguasaan modal simbolik dan efektivitas kerja dari strategi investasi simbolik di lapangan. Jika strategi ini bekerja efektif kekuasaan simbolik sebagai loncatan menuju kekuasaan substantif perlahan tapi pasti akan tercapai.

Deskripsi berbagai konsep di atas dapat digunakan untuk menganalisa konteks organisasi Islam ideologis seperti HTI dan MMI karena keduanya mempunyai orientasi ideologis dan politis terkait erat dengan konsep *habitus*, arena perjuangan, dan kekuasaan simbolik.

D. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Metode kualitatif merupakan proses penelitian yang ingin menghasilkan data bersifat deskriptif, yaitu berupa hasil ucapan, tulisan, dan perilaku individu atau kelompok yang dapat diamati berdasarkan subyek itu sendiri (Moleong, 2004).

2. Objek Studi

Penelitian ini menjadikan HTI dan MMI sebagai objek kajian, sebab kedua organisasi ini dianggap paling solid, militan, dan mempunyai jaringan yang tersebar di ragam wilayah di tanah air termasuk di Yogyakarta.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data terdiri dari dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari wawancara mendalam (*depth interview*) dan observasi langsung (*participant observation*). Data sekunder terdiri dari hasil-hasil publikasi berupa buku-buku, majalah, jurnal, dan lain-lain terkait dengan HTI dan MMI yang relevan dengan masalah penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Data penelitian yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif deskriptif. Metode ini sesuai dengan langkah-langkah yang disampaikan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (1992) sebagai berikut: pertama, analisis data dilakukan dari pengumpulan informasi melalui wawancara, kuisioner maupun observasi langsung. Kedua, melakukan reduksi data yakni memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan permasalahan penelitian. Ketiga, data yang telah direduksi dilanjutkan ke tahap penyajian baik berupa tabel maupun narasi. Keempat, tahap terakhir menarik kesimpulan final.

E. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Dalam lintasan sejarah pra-kemerdekaan sampai dekade 1980-an, keberadaan organisasi Islam ideologis –yang telah mengalami metamorfosis pada setiap rezim- semisal SI dan Masyumi tidak pernah mengalami pergeseran signifikan:

berorientasi pada reproduksi syariat Islam lewat pemberlakuan kembali isi Piagam Jakarta. Hal ini kemudian mendorong kelahiran organisasi Islam ideologis seperti Hizbut Tahrir (HT) yang datang dan berkembang di tanah air pada tahun 1982 (Muhsin, 2007). Pada rezim Orde Baru yang represif dan otoriter, HTI mengalami masa dilema. Di satu sisi pemikirannya mulai menyebar dan tumbuh subur di kalangan intelektual (kampus) Muslim, tetapi secara politik tidak ditopangi oleh iklim politik Orde Baru yang kondusif di sisi lainnya. Akhirnya, pada dekade 1980-an praktis HTI hanya melakukan konsolidasi internal melalui penguatan jaringan di tataran internal (kader potensial).

Pasca bergulirnya reformasi yang ditandai oleh runtuhnya kekuasaan Orde Baru pada 21 Mei 1998, HTI dan beberapa organisasi Islam ideologis lainnya seperti MMI mulai menunjukkan identitas dan eksistensinya kepada publik. Meminjam istilah Ismail Yusanto, juru bicara pusat HTI, kemunculan reformasi adalah berkah bagi HTI untuk melakukan gerakan *tafa'ul ma'a al-ummah* (interaksi dengan masyarakat luas). Artinya, HTI yang pada rezim Orde Baru melakukan gerakan bawah tanah (tersembunyi), seiring bergulirnya reformasi serta-merta mengubah arah gerakan ke sistem terbuka (terang-terangan). Perubahan gerakan ini membawa konsekuensi logis bagi HTI, berani dan siap bertarung dengan ideologi-ideologi lain, termasuk ideologi negara yang sekuler. Disinilah konsep perjuangan arena itu bermula.

Serupa dengan HTI, MMI yang lahir pada tahun 2000 melalui kongres I di Yogyakarta dengan visinya memperjuangkan tegaknya syariat Islam secara total (*kaffah*) dalam segala bidang (*tabiqu as-syariah*), bermakna bahwa penerapan totalitas syariat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah suatu keniscayaan. Praktis, terjadi *vis-a-vis* antara MMI dan Negara dalam konteks ideologi. Akibatnya, perebutan pengaruh (*influence*) yang menggelinding pada ranah yang lebih luas, yaitu ke arah pertarungan medan arena kekuasaan tak terhindarkan. Lantas, pertanyaan yang mengemuka adalah di mana arena-arena perjuangan kedua organisasi itu berada pasca reformasi?

Berdasarkan data-data primer yang diperoleh melalui wawancara dan hasil observasi langsung atas berbagai aktivitas HTI dan MMI di Yogyakarta, maka secara gamblang ragam arena perjuangan kedua organisasi dapat diidentifikasi menjadi tiga basis utama, yaitu arena berbasis institusi, komunitas, dan lembaga pemerintahan (birokrasi). Arena-arena tersebut adalah sebagai berikut:

1. Arena Perjuangan HTI

Secara sosiologis terdapat beberapa arena perjuangan HTI dalam praksisme organisasinya, yakni arena berbasis institusi, komunitas, dan lembaga. Ketiga basis arena tersebut tersebar dalam level-level atau kelas sosial masing-masing. Spesifikasi arena-arena tersebut adalah: satu, arena berbasis institusi meliputi masjid, sekolah, dan kampus (perguruan tinggi). HTI mengklasifikasi masjid menjadi dua, yakni masjid kampus dan non-kampus. Proses perjuangan di arena masjid berlangsung lewat ceramah, diskusi, kajian, seminar, dan orasi ilmiah secara kontinue. Arena sekolah meliputi semua sekolah umum dan swasta dari Taman Kanak-kanak (TK) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) melalui pendekatan formal dan informal. Secara formal pihak sekolah mengundang langsung HTI untuk berpartisipasi atau dengan mengajukan proposal pelatihan.

Secara informal lewat silaturahmi, kontak personal, kajian dan diskusi. Terkait kampus, HTI memfokuskan dakwah politiknya pada semua kampus baik umum maupun Islam. Proses perjuangan di kampus berlangsung lewat diskusi kelas, presentasi, kajian forum kecil, dan debat. Bahkan dalam praksisnya, HTI membagi kampus menjadi dua, yakni eksakta dan humaniora. Kampus eksakta adalah kumpulan beberapa fakultas atau jurusan seperti MIPA, kedokteran, pertanian, dan tehnik. Sedangkan kampus humaniora terdiri dari fakultas atau jurusan ekonomi, sosial politik, ilmu budaya, hukum, dan filsafat. Dari kedua kampus tersebut, kampus eksakta merupakan ranah strategis yang menjadi basis dakwah dan perjuangan HTI lantaran keterbukaan dan kemudahan akses serta karakteristiknya yang tidak terlalu mengandalkan rasionalitas (logika).

Dua, arena berbasis komunitas mencakup komunitas takmir masjid, dosen, mahasiswa, majelis taklim, posyandu, buruh, dan tahlilan. Komunitas takmir masjid terdiri dari pengurus-pengurus yang aktif mengelola masjid sesuai dengan bidang masing-masing. Pendekatan dilakukan dengan silaturahmi, kontak personal, dan pembentukan forum takmir. Melalui forum takmir HTI dapat mentransformasikan gagasannya kepada masyarakat lewat kajian, ceramah, dan diskusi. Komunitas dosen tersebar di kampus-kampus umum maupun Islam dengan proses perjuangan kerap dilakukan melalui kontak personal, dialog, dan pembentukan kelompok diskusi intensif. Dengan terbentuknya kelompok kecil dari dosen-dosen lintas jurusan, memudahkan terjadinya interaksi dan sharing informasi hingga berlanjut ke tahap pembentukan sebuah komunitas yang mempercepat penyebaran ide-ide dan pemikiran. Komunitas mahasiswa terbentuk diawali dengan kontak personal, interaksi intensif, diskusi, dan pembentukan jaringan antar jurusan atau fakultas. Komunitas majelis taklim terbentuk lewat penitipan buletin mingguan Al-Islam, kontak personal tokoh komunitas, silaturahmi, dan tausyiah pengajian. Komunitas posyandu (pos pelayanan terpadu) terbina dengan interaksi personal, kajian akidah, dan pemberian motivasi. Pendekatan dengan komunitas buruh dilakukan dengan dua cara, formal dan informal. Pendekatan formal dengan mengajukan proposal kerja sama penyelenggaraan diskusi, dialog, dan seminar tentang problematika kaum buruh dan sosialisasi buletin Al-Islam. Secara informal melalui kontak antar individu, silaturahmi, dan pengajian. Sedangkan komunitas tahlilan melalui tausyiah dalam bahasa Jawa, tadarusan, dan obrolan santai serta pendekatan personal.

Tiga, arena berbasis lembaga pemerintahan (birokrasi), yaitu eksekutif dan legislatif. Di level eksekutif, HTI menggunakan pendekatan formal melalui audiensi kepada Gubernur dan Wali Kota Yogyakarta. Pendekatan lain dengan mengundang para tokoh birokrasi untuk menghadiri forum yang digagas HTI guna berdiskusi tentang topik yang dianggap penting. Tak berbeda dengan level legislatif, HTI juga melakukan pola pendekatan secara formal melalui audiensi dan dialog langsung dengan anggota DPRD I Yogyakarta. Pendekatan di tingkat eksekutif dan legislatif tersebut dilakukan dalam upaya menjalin kerja sama dan transformasi gagasan HTI.

2. Arena Perjuangan MMI

Berdasarkan klasifikasi arena perjuangan MMI terdiri dari arena berbasis

institusi, komunitas, dan lembaga. Satu, arena berbasis institusi berupa masjid, sekolah, dan pesantren. Pola pendekatan di masjid dilakukan dengan menggiatkan silaturahmi, diskusi, penyaluran khatib jumat, dan tabligh akbar terkait erat dengan sosialisasi syariat Islam. Ini dilakukan dalam rangka penyeragaman pemikiran dan sosialisasi syariat Islam. Di kalangan pelajar sekolah umum maupun pelajar Islam khususnya siswi (muslimah), pola pendekatan berlangsung dengan berkirim surat kepada kepala sekolah, silaturahmi dan diskusi dengan tujuan agar pihak sekolah menganjurkan para siswi mengenakan kerudung saat belajar di sekolah. Sedangkan di pesantren pendekatan dilakukan dengan dua cara, formal dan informal. Cara-cara formal dengan menawarkan diri secara resmi untuk mengadakan agenda semisal tabligh akbar. Sebaliknya, cara-cara informal dengan silaturahmi dan menyebarkan kader sebagai tenaga pengajar di pesantren terkait.

Dua, arena berbasis komunitas terdiri dari komunitas kaum intelektual dan majelis taklim. Kalangan intelektual terdiri dari akademisi, cendekiawan dan politisi Muslim dengan pendekatan interaksi personal yang intens dan menghadirkan mereka dalam acara diskusi, seminar, dialog dan debat yang diselenggarakan MMI. Komunitas majelis taklim terbentuk lewat pengajian dan kajian tauhid di masjid setempat. Tiga, arena berbasis lembaga birokrasi yaitu, eksekutif dan legislatif. Di level eksekutif adalah lembaga di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten, sedangkan legislatif DPRD I dan II. Pendekatan di kedua lembaga tersebut berlangsung dengan mengirim surat resmi dan audiensi. Selain di level eksekutif dan legislatif, MMI juga melakukan audiensi dan dialog dengan lembaga kepolisian DIY. Pola-pola pendekatan di level elit tersebut dalam usaha mendapat dan memperbesar jaringan sosial MMI.

3. Kekuasaan Simbolik Sebagai Tujuan

Berdasarkan identifikasi arena-arena perjuangan HTI dan MMI di atas, maka pertanyaan kritis selanjutnya, kemana terminal akhir dari perjuangan arena-arena kedua organisasi tersebut? Menjawab pertanyaan ini diperlukan beberapa analisis tentang arena perjuangan kedua organisasi. Pertama, dakwah dan jihad sebagai simbol reproduksi *habitus*. Terdapat tiga kekuatan simbol HTI dan MMI yang menjadi *locus* perjuangannya, yaitu simbol gaya hidup, kepemilikan kelas, dan kuasa simbolik. Ketiga simbol tersebut saling berkorelasi yang pada HTI dan MMI direpresentasikan oleh dakwah, jihad, dan politik. Dakwah dan jihad sebagai simbol gaya hidup dikonstruksi sebagai usaha untuk mengubah paradigma atau nalar individu atas keyakinan-keyakinan dan sistem pemikiran yang berlandaskan pada Quran dan Sunah Nabi yang akhirnya bermuara pada terbentuknya nalar homogen atau homogenitas *habitus*. Homogenitas *habitus* yang bertujuan menciptakan koherensi masyarakat menjadi dasar kedua organisasi untuk memiliki gaya hidup berbeda dari yang lain. Perbedaan sistem kepercayaan itu kemudian membentuk suatu kebudayaan yang menunjukkan ciri sebuah kelas. Ketika gaya hidup dan kepemilikan kelas direduksi sebagai sesuatu yang berbeda, maka kecenderungan untuk melakukan disposisi-disposisi (berorientasi pada pencapaian praksis politik atau kekuasaan) melalui pembentukan struktur terus-menerus (Beilharz, 2002) sangat terbuka. Di sini, tampak disposisi dan *habitus*

telah membentuk pola pikir dan cara kerja para aktor kedua organisasi Islam ideologis sehingga mampu mereproduksi kebudayaan menjadi kebudayaan baru berdasarkan sistem Islam yang berorientasi politik dan ideologis.

Kedua, birokrasi dan intelektual sebagai arena perjuangan politik. Dalam arena perjuangannya HTI dan MMI memiliki tiga strategi sebagai hasil optimalisasi dari kepemilikan empat modal yakni modal ekonomi, budaya, sosial, dan simbolik. Pertama, strategi investasi biologis. Investasi ini meliputi strategi pewarisan dan strategi pendidikan. Strategi pewarisan terletak pada usaha untuk mengontrol jumlah keturunan dan memudahkan kenaikan posisi kelas yang tercermin dari pilihan konsumsi makanan, olah raga, dan hiburan. Strategi ini bertujuan untuk menjamin kekayaan (kepemilikan uang, materi, tanah dsb) yang berelasi dengan modal ekonomi. Sedangkan strategi pendidikan berfungsi untuk menghasilkan pelaku sosial guna melanjutkan perjuangan yang diwarisi oleh kelompok sosial demi memperbaiki jenjang sosial. Strategi ini berupa memilih sekolah-sekolah favorit (tertentu) untuk pendidikan anak, merekrut sumber daya yang berpendidikan tinggi, dan sebagainya.

Kedua, strategi investasi ekonomi. Strategi ini bertujuan untuk mempertahankan atau menambah modal dari berbagai jenisnya termasuk modal sosial, yang bermanfaat untuk melanggengkan hubungan-hubungan sosial yang berjangka pendek atau pun panjang yang terpelihara melalui pertukaran uang, kerja sama, perkawinan, penyediaan waktu, dan sebagainya. Ketiga, strategi investasi simbolik, berfungsi untuk mempertahankan atau meningkatkan pengakuan sosial individu atau kelompok lain guna mereproduksi persepsi dan penilaian yang mendukung kekhasannya. Investasi simbolik selalu diarahkan kepada perjuangan untuk mengumpulkan status simbolis mereka dan mengubah persepsi para pelaku lainnya yang berbeda. Di sini arena-arena berbasis institusi, komunitas, dan lembaga menjadi *locus* perjuangannya. Dengan strategi tersebut, kekuasaan simbolik yang menjadi tujuan utama individu atau kelompok—sebelum mencapai kekuasaan substantif—perlahan-lahan akan tercapai.

Ketiga, investasi simbolis membentuk kekuasaan simbolik. Kekuasaan simbolik adalah kekuasaan yang diperoleh dari hasil pertarungan simbolik bersifat dominasi yang dapat memaksa pihak lain untuk menerima hukum-hukum, sistem-sistem, perangkat ideologi sebagai sebuah legitimasi dengan menyembunyikan hubungan kekuasaan yang mendasari kekuasaannya. Di sini terdapat relasi yang sangat erat antara kekuasaan simbolik dengan modal simbolik yang berupa prestise, status, otoritas, dan legitimasi. Korelasi antara keduanya ditentukan oleh dua syarat utama, yaitu penguasaan modal simbolik dan efektivitas strategi investasi simbolik bekerja. Syarat pertama telah dipenuhi oleh HTI dan MMI melalui reproduksi *habitus* dan tindakan-tindakan yang membutuhkan apresiasi dan otoritas publik seperti silaturahmi, diskusi, dialog, audiensi, termasuk penguasaan atas arena-arena seperti masjid, sekolah, kampus, komunitas kaum intelektual, lembaga eksekutif dan legislatif. Terkait efektivitas strategi kedua dapat dikatakan bahwa perjuangan arena-arena kekuasaan simbolik HTI dan MMI di Yogyakarta pada ranah institusi, komunitas, dan lembaga pemerintahan (birokrasi) cukup berjalan efektif meskipun kerap mengalami kendala. Arena kekuasaan (politik) menurut Bourdieu dianggap sebagai arena dominasi atau

paling strategis dalam setiap masyarakat karena bersinggungan langsung dengan hirarki kekuasaan (Jenkis, 2004). Terdapat beberapa arena kekuasaan yang efektif dari kedua organisasi. Arena kekuasaan simbolik HTI yang paling dominan terdapat di arena masjid, kampus, lembaga eksekutif dan legislatif. Adapun arena kekuasaan simbolik MMI yang paling strategis adalah lembaga eksekutif, legislatif, kepolisian, serta kaum intelektual.

Dalam praksisnya, upaya mengakumulasi modal simbolik secara efektif dan efisien oleh HTI dan MMI ternyata tak terhindarkan dari adanya benturan-benturan yang berimplikasi secara sosial dan politik terhadap komunitas Islam lainnya di Yogyakarta. Secara sosial HTI bersinggungan dengan komunitas Muhammadiyah terkait dengan persoalan kader pemuda dan arena dakwah masjid, sebaliknya MMI bersinggungan dengan komunitas KAMMI sebagai *under bow* PKS terkait dengan masjid kampus sebagai arena perjuangan. Secara politik kedua organisasi bersinggungan dengan PKS khususnya perbedaan konsep dan metode perjuangan dalam menegakkan syariat Islam. Implikasi sosial dan politik tersebut diyakini atau tidak membuat dinamika perjuangan kekuasaan simbolik kedua organisasi kian dinamis, karena terdapat perbedaan, benturan, bahkan konflik dan terkadang tercipta kerja sama, interaksi dan komunikasi intensif.

F. Kesimpulan dan Saran

Kemunculan organisasi Islam ideologis seperti HTI dan MMI dalam kancah perpolitikan Indonesia khususnya politik Islam di awal reformasi sampai saat ini adalah sebagai upaya menawarkan konsep alternatif, yaitu konsep perjuangan memperebutkan kekuasaan simbolik melalui penguasaan arena-arena yang tersebar di berbagai tempat: institusi, komunitas, dan lembaga pemerintahan (birokrasi) dengan pola-pola pendekatan yang khas seperti optimalisasi modal ekonomi, budaya, sosial, dan simbolik. Modal-modal tersebut dimobilisasi oleh HTI dan MMI dalam bentuk strategi-strategi, yaitu strategi investasi biologis, ekonomi, dan simbolik. Strategi-strategi itu dikonstruksi dalam usaha untuk mencapai kekuasaan simbolik: kekuasaan dominatif (politik). Akibatnya, penguasaan atas arena-arena dominasi itu kerap bersinggungan dengan kepentingan-kepentingan pihak lain seperti pemerintah (Negara), partai politik, dan komunitas Islam lainnya menjadi tak terelakkan.

Terkait dengan dinamika perjuangan kekuasaan HTI dan MMI ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut: pertama, dalam memperjuangkan kekuasaan simbolik yang bermuara pada tercapainya kekuasaan substantif (politik), kedua organisasi harus tetap berpegang pada credo perjuangan tanpa anarkisme yang menabrak sistem demokrasi Indonesia. Dengan demikian, strategi investasi simbolik yang diperjuangkan berjalan efektif dan efisien.

Kedua, memperbesar dan memperkuat modal sosial khususnya kerja sama dengan pihak-pihak yang memiliki hirarki kekuasaan seperti eksekutif dan legislatif mutlak diimplementasikan. Penguasaan jejaring sosial memperlancar peluang terbitnya perda-perda syariat yang mendukung visi dan misi kedua organisasi.

Ketiga, memperbesar kepemilikan modal ekonomi dan modal budaya dalam

perjuangan kekuasaan simbolik merupakan suatu keniscayaan. Sebab, kedua modal tersebut akan bertambah dan berkurang seiring dengan strategi praksis di lapangan. Memperbanyak investasi keturunan dengan pendidikan Islam yang baik dan berkualitas dapat menghasilkan modal ekonomi (anak terdidik) sebagai investasi jangka panjang. Demikian juga optimalisasi investasi budaya semisal kaum intelektual dan agamawan semakin mempercepat kenaikan jenjang sosial kedua organisasi di mata publik.

Keempat, memperluas arena-arena perjuangan seperti komunitas-komunitas kaum marginal (kelompok rakyat jelata) di pinggiran yang secara sosial, budaya, dan ekonomi kurang mendukung adalah alternatif strategis. Dengan persebaran kekuatan sampai ke pelosok pinggiran daya *magis* HTI dan MMI kian diperhitungkan. Program ekonomi syariah yang pro-rakyat miskin dapat dijadikan alternatif pendekatan tersebut.

Kelima, pemerintah pusat maupun daerah perlu mengkaji ulang konsep yang ditawarkan oleh organisasi Islam ideologis terkait penerapan syariah Islam di Indonesia. Membuka pintu komunikasi intensif dengan organisasi Islam ideologis mendorong terciptanya harmonisasi dan kedewasaan dalam berpolitik. Dengan demikian, tak mustahil antara pemerintah dan organisasi-organisasi tersebut dapat menjadi *pathner* yang sinergis.

Daftar Pustaka

- Ahnaf, Muhammad Iqbal, 2004. MMI dan HTI; the image of the others. Dalam A.Maftuh Abegebriel "*Negara Tuhan The Thematic Encyclopedia*". Yogyakarta: SR-Ins Publishing.
- Beilharz, Peter, 2002. *Teori-teori Sosial Observasi Kritis terhadap Para Filosofis Terkemuka*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fashri, Fauzi, 2007. *Penyingkapan Kuasa Simbol Apropriasi Reflektif Pemikiran Pierre Bourdieu*. Yogyakarta: Juxtapose.
- Haryatmoko, *Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa*. Majalah Basis nomor 11-12. tahun ke-52, November-Desember 2003.
- Jenkins, Richard, 2004. *Membaca Pikiran Pierre Bourdieu*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Mile, Matthew B. dan Huberman, A. Michael, 1992. *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J., 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhsin, Illiya, 2007. *Gerakan Penegakan Syariat Islam Studi tentang Gerakan Sosial Hizbut Tahrir Indonesia di DIY*. Tesis S2 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Nashir, Haedar, 2007. *Gerakan Islam Syariat Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*. Jakarta: PSAP.
- Panggabean, Samsu Rizal dan Amal, Taufik Adnan, (2004). *Politik Syariat Islam Dari Indonesia hingga Nigeria*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Rusdiarti, Suma Riella. *Bahasa, Pertarungan Simbol dan Kekuasaan*. Basis nomor 11-12. tahun ke-52, November-Desember 2003.

Identitas Penulis

Iskandar Zulkarnain, lahir di Saing pada tanggal 2 Juni 1981, adalah lulusan Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada 2006 dengan gelar S.I.P, kemudian melanjutkan ke jenjang Pascasarjana pada Jurusan Sosiologi Universitas Gadjah Mada tahun 2009 dengan gelar M.A. Saat ini ia menjadi staf pengajar pada Program Studi Sosiologi Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung. Dalam dunia penulisan, ia telah menerbitkan beberapa karya antara lain: *Merokok Nggak Produktif, Percuma!* (2009), *Cerdik Cerdas Skripsi* (Pinus Publisher, 2007), dan karya-karya terbaru mendatang.